

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

1.1.1 Latar Belakang

Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa, dan hal ini telah dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah telah mencanangkan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke kawasan yang berada di Kalimantan Timur, yaitu kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbagai riset menyatakan terdapat berbagai macam pertimbangan dan alasan mengapa terjadinya pemindahan Ibukota negara, dikarenakan beberapa faktor dari tidak merata pembangunan dan ekonomi, kapasitas populasi di Jakarta sudah melebihi batas maksimal, diperlukan bentuk kehidupan baru dengan konsep *modern*, *smart*, dan *green city* (Amal & Sulistyawan, 2022). Alasan dan pertimbangan tersebut dapat dikatakan sebagai permulaan dan juga alasan mendasar yang didasari oleh fakta

Jika melihat dari sejarah terbentuknya Ibu Kota Negara maka, sejarah nya dimulai dari penetapan adanya DKI Jakarta sebagai pusat Negara Indonesia hal tersebut berasal dari hal yang terdapat pada masa kolonialisme di Nusantara. DKI Jakarta sesungguhnya merupakan harta turunan dari Belanda dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang di kembangkan dari kota pelabuhan Jayakarta 1619 silam. Belanda melakukan pemilihan Jakarta sebagai Ibukota Negara dikarenakan kepentingan yang bersumber dari VOC yang mana mempunyai kegiatan monopoli terhadap perdagangan dan kegiatan colonial wilayah melalui Pemerintahan Belanda pada tahun 1602. Benteng beserta pemukiman warga Belanda menjadi faktor terbentuknya Jakarta, yang dimana pada masa tersebut Jakarta diberi nama Batavia. Batavia secara resmi dibentuk pada 4 maret 1621, pembangunan Batavia sendiri pun rampung pada tahun 1650 dan kawasan Batavia saat itu mendapatkan julukan '*Queen of the East*' yang memiliki makna tujuan utama Belanda terkait perdagangan.

Batavia berubah menjadi 'Jakarta' terjadi pada saat kedudukan Jepang di Indonesia, pada tahun 1942 pemerintah militer Jepang mengganti nama tersebut, dikarenakan upaya pergantian nama 'Jakarta' ini menjadi strategi dalam menarik hati penduduk Indonesia pada masa itu. Berjalannya waktu melalui kemerdekaan Negara

Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah negara memantapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, walaupun pernah terjadi pemindahan ibukota pada tahun 1945-1949 dikarenakan adanya masa darurat akan tetapi Ibu Kota tetap kembali ke Jakarta. Jakarta menjadi Ibu Kota Negara sesuai dengan keputusan Presiden yang tercantum pada No. 2 Tahun 1961. Berjalannya waktu juga memunculkan UU untuk kembali menjadikan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari UU No. 11 Tahun 1990 dan UU No. 34 Tahun 1999, dan saat ini yang masih aktif pada UU. No. No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Pemindahan Ibu Kota Negara ini tentu menimbulkan berbagai macam pandangan, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan yang akan dijadikan Ibu Kota Negara nanti, bermacam pandangan tersebut muncul dikarenakan apakah warga lokal kawasan tersebut dapat menerima atau mendapatkan nilai positif dari pemindahan ibukota ini, sehingga potensi konflik tentu saja dapat terjadi dan dibutuhkanlah mitigasi konflik agar tidak terjadinya konflik antar warga dan pemerintah. Pemindahan Ibukota ini tentu merujuk dengan berbagai alasan yang ada. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintah melalui PPN/BAPPENAS, dimana terdapat beberapa alasan dalam memindahkan ibukota negara, pertama, data yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menjelaskan bahwa populasi pada pulau Jawa telah meningkat sekitar 56,10 persen atau 151,59 juta penduduk yang dimana kependudukan Indonesia ini telah terpenuhi dan terkonsentrasi pada Pulau Jawa, kedua dimana dominasi dan kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB), ketiga mengacu pada ketersediaan air bersih di Jawa yang tengah menghadapi krisis air dan hal tersebut berdasarkan data tahun 2016 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, keempat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan oleh Bappenas menjelaskan bahwasanya pulau Jawa telah mengalami begitu banyak perubahan bahkan konversi dalam fungsi lahan itu sendiri, sehingga terdapat proporsi yang tidak seimbang (Suryadi Jaya Purnama, 2022).

Pada beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa dari berbagai konflik yang terdapat pada kawasan Kalimantan Timur, maka timbul pandangan bahwa pemindahan ibukota yang akan dilaksanakan ini akan memunculkan potensi konflik. Begitupun dengan adanya eksodus, yang dimana akan menumbuhkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, ketidakseimbangan tersebut dikarenakan

gelombang eksodus merupakan kelompok masyarakat yang telah memiliki standar hidup di Jakarta, sehingga ketimpangan dapat terjadi dan mengganggu di kawasan ibukota di Kalimantan Timur nantinya (Djayanti et al., 2022). Dengan adanya konflik tersebut maka Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hadir dalam pelaksanaan mitigasi konflik pada kawasan yang memiliki potensi konflik. PUPR merupakan penyelenggara urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan ini maka peneliti ingin mendalami dan meneliti bagaimana strategi PUPR dalam melakukan mitigasi konflik dalam pemindahan ibukota negara sehingga dengan mitigasi konflik ini maka potensi munculnya konflik akan dapat diredam.

1.1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana strategi PUPR dalam mitigasi konflik dalam pembangunan IKN di Penajam Paser

1.1.3 Tujuan Penelitian

Berhubungan telah terbentuknya rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan sebagaimana permasalahan yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui strategi PUPR dalam mitigasi konflik dalam pembangunan IKN di Penajam Paser

1.1.4 Manfaat Penelitian

1.1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam pengembangan dalam bidang keilmuan Sosiologi, dan juga penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk kajian yang dapat digunakan oleh pembaca atau peneliti berikutnya.

1.1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat baik bagi para pemerintah dan juga peneliti yang akan melihat bagaimana melakukan mitigasi konflik pada kawasan-kawasan yang rawan akan potensi konflik, dan tentunya penelitian ini juga dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi para pemerintah atau pembaca bahkan peneliti di kemudian harinya.

1.2 Metode Penelitian

1.2.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari adanya judul penelitian ini maka, penelitian ini dikerjakan dengan penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencerna sebuah fenomena tentang hal yang di alami oleh subjek penelitian. Selain itu sumber data yang di peroleh melalui penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebih nya merupakan data tambahan seperti dokumentasi(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020). Sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam pada judul dan rumusan masalah penelitian, maka penelitian dengan jenis kualitatif akan menjadi jembatan antara permasalahan yang akan diteliti baik di dalam lapangan ataupun diluar lapangan.

Penelitian kualitatif sendiri dalam pengumpulan data yang dilakukan tidak dipandu melalui teori akan tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Dengan jenis penelitian kualitatif ini maka peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan data yang mengandung pengertian ataupun makna atau. Makna merupakan data akurat dan data yang pasti serta merupakan suatu nilai dibalik data hasil yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generaliasasi akan tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi pada tingkat kualitatif dinamakan dengan *transferability*, yang memiliki pengertian penelitian dapat dilakukan di tempat lain apabila tempat tersebut memiliki karakteristik yang sama.

1.2.2 Jenis Penelitian

Karl Max memandang konflik merupakan titik paling tengah pada suatu masyarakat. Tengah atau sentral yang Karl Max maksud yaitu antara kaum kapitalis dengan proletar. Terdapat berbagai konflik yang dipahami untuk hal yang berkaitan dari adanya kekacauan, kaum pemilik modal dan juga kaum kelas bawah tidak pernah berdamai, dengan demikian masyarakat menjadi pecah karena hanya berbeda status ekonomi, dan konflik akan sering terjadi terhadap dua kelompok ini. Dengan penyampaian Karl Max antara kaum proletar dan burjois, apakah hal tersebut juga akan terjadi antara pemerintah dengan adanya warga lokal pada kawasan yang akan dibangun menjadi kawasan Ibu Kota Negara atau IKN. Tentu hal ini menjadi sebuah tantangan

bagi para peneliti untuk melihat bagaimana realitas lapangan yang akan terjadi, sehingga kejadian dilapangan yang akan dirasakan langsung oleh peneliti dapat diuraikan pada hasil penelitiannya nanti.

Sebagaimana hasil yang dapat diuraikan oleh peneliti nantinya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif sendiri merupakan pengkaji data yang didapatkan oleh peneliti berupa ucapan, objek, atau sifat/perilaku dan data tersebut tidak ditampilkan melalui bentuk angkata maupun statistik melainkan peneliti akan menampilkan pemaparan situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, selain itu hasil dari deskriptif yang diperoleh dapat berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi lainnya (Moleong, 2005). Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan bagaimana kondisi di lapangan terkait mitigasi konflik yang akan dilakukan oleh PUPR kepada masyarakat lokal dalam mengantisipasi adanya potensi konflik dalam pembangunan IKN yang sedang berjalan.

1.2.3 Metode Penentuan Subjek Penelitian

Peneliti akan melakukan penentuan subjek penelitian sebelum adanya pengolahan data lebih jauh. Dalam penentuan subjek penelitian ini terdapat kriteria-kriteria yang dapat di klasifikasikan sesuai dengan adanya judul penelitian. Sehingga peneliti akan memilih *Purposive Sampling* sebagai penentu subjek yang akan diteliti dan dimintai data. *Purposive sampling* sebuah metode *sampling* non-random, peneliti akan memastikan mengumpulkan ilustrasi melalui langkah menentukan identitas spesial yang sesuai dengan tujuan penelitian oleh karena itu diharapkan bisa menangani kasus penelitian (Lenaini, 2021). Pada teknik *purposive sampling* peneliti menekankan dalam pemilihan atau penentuan subjek akan terdapat kriteria-kriteria yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang ada, sehingga data yang didapatkan akan benar dan valid adanya.

Dengan teknik *purposive sampling* maka peneliti telah mempertimbangkan bahwsanya pengambilan teknik ini merujuk kepada kepastian dan kebenaran data. Dengan teknik *purposive sampling* juga, maka peneliti akan lebih mudah mengklasifikasikan subjek yang akan diambil datanya saat dilapangan. Oleh karena itu akan terdapat kriteria-kriteria yang sebaiknya akan peneliti berikan kepada subjek yang akan diambil datanya untuk penelitian ini, kriteria tersebut yaitu:

1. Merupakan bagian dari kawasan pembangunan IKN (warga lokal)

2. Merupakan bagian dari pemangku kepentingan seperti (Pejabat /Pegawai PUPR, RT, RW, lurah, camat, bupati,)
 3. Merupakan masyarakat yang terdampak dari pembangunan IKN
 4. Memiliki KTP, dikarenakan subjek yang akan diambil data nya memiliki identitas diri
 5. Sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki penyakit jiwa, dikarenakan data yang akan diminta tentu bersifat valid adanya
- Kriteria diatas menjadi penentu subjek yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan *purposive sampling*. Dengan adanya kriteria tersebut diharapkan peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi lapangan. Sehingga valid nya data ini dapat menjadi kebenaran dari hasil penelitian terkait mitigasi konflik yang berada di kawasan IKN.

1.2.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan peneliti lakukan, maka terdapat macam data yang akan dikumpulkan dengan cara yang berbeda. Pengumpulan data ini tentu menjadi salah satu sumber bahwa data yang akan diteliti akan memiliki keselarasan dengan adanya permasalahan yang diteliti. Dengan hal tersebut maka pengumpulan data yang beragam ini dipastikan memiliki kesinambungan antara data satu dengan data lain nya, walaupun dengan bentuk atau jenis data yang berbeda akan tetapi data yang diperoleh nantinya akan memiliki satu kunci solusi dalam permasalahan yang diteliti.

Dalam metode pengumpulan data terdapat berbagai cara untuk mendapatkan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian kualitatif , akumulasi data dengan cara *natural setting* (kondisi yang alamiah) , basis informasi primer dan bentuk pengumpulan informasi akan lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant obervation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Pada intinya kegiatan atau kegunaan data setelah diolah dan dianalisis ialah sebagai dasar yang objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan(Iryana, 1990). Oleh karena itu setiap metode pengumpulan data ini akan peneliti berikan penjelasan serta bagaimana teknis saat melakukan pengambilan data di lapangan seperti dibawah:

1.2.4.1 Observasi

Arikunto (Gunawan, 2014:143) menyatakan observasi bentuk suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengadakan riset

secara akurat, serta pendataan secara teratur. Penjelasan lainnya memberikan penjelasan bahwasanya observasi merupakan kegiatan dimana peneliti atau kolaborator nya mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan saat berada di lapangan(W Ananta Gautama ·, 2017). Kondisi pembangunan IKN yang berada di Kab.Penajam Paser Utara yang didapatkan dalam observasi ini merupakan catatan lapangan dan dikumpulkan secara sistematis.

Dalam pelaksanaan secara teknis di lapangan maka peneliti akan terjun langsung kedalam lokasi penelitian atau lapangan. Dalam kegiatan turun nya peneliti ke lapangan maka akan ada tahapan yang menjadi kegiatan saat penelitian. Peneliti tentu akan melakukan pendekatan secara perlahan dan terstruktur kepada para subjek penelitian yang nantinya tergolong memenuhi kriteria untuk menjadi subjek penelitian. Pada sisi lain peneliti juga akan melakukan pendekatan kepada para warga lokal yang terkena dampak pembangunan IKN, baik dampak tersebut berupa positif ataupun negatif, dengan ini maka observasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang ada.

1.2.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan didefinisikan sebagai interaksi dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Kahn & Cannell 1957 dalam Sarosa, 2012: 45). Dalam riset yang dilakukan peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan tema penelitian kepada narasumber yang sesuai dengan data yang diperoleh.Wawancara pada riset ini merupakan jenis wawancara terstruktur. Menurut Guba Dan Lincoln (1981) dalam Moleong (2013, 190) wawancara terstruktur bentuk wawancara untuk menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.

Dalam kegiatan wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara terstruktur seperti yang telah dijelaskan di paragraph pertama. Secara teknis maka peneliti akan turun ke lapangan dan melakukan kunjungan ke rumah warga yang terdampak pembangunan IKN, apabila kondisi tersebut tidak memungkinkan maka peneliti akan melakukan wawancara melewati telepon atau beberapa pendukung perangkat elektronik lain nya, Dalam wawancara ini tentu wawancara yang dilakukan tertuju pada subjek yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang diberikan oleh peneliti. Maka dari itu data yang akan

diambil dapat sesuai dengan judul yang diteliti oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan juga tidak merupakan kegiatan tanya jawab, akan tetapi kegiatan wawancara ini akan dilakukan secara terstruktur, peneliti tentu akan menyusun beberapa pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut telah tersusun dari pertanyaan yang memiliki urgensi tinggi dan urgensi rendah, sehingga wawancara dapat berjalan dengan baik dan terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti.

1.2.4.3 Dokumentasi

Bungin (Gunawan, 2014:177) dokumentasi salah satu metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data historis. Dalam penelitian ini dokumentasi ini diambil dengan cara berupa pengambilan foto atau gambar kondisi pembangunan kawasan IKN yang berada di Kab.Penajam Paser Utara serta gambaran kawasan masyarakat lokal yang ada kawasan IKN.

Dalam penelitian ini dokumentasi juga menjadi sumber data yang dibutuhkan untuk menjelaskan terkait kondisi yang berada di lapangan. Dalam penelitian ini tentu dokumentasi akan diambil dengan cara peneliti turun ke lapangan dan menggunakan perangkat yang mendukung untuk mengambil dokumentasi berupa gambar atau elektronik. Apabila terdapat kekurangan dokumentasi dilapangan maka peneliti akan menambahkan dokumentasi melewati *internet searching* baik dari website pemerintah atau website PUPR yang dapat diakses oleh peneliti.

1.2.5 Metode Validasi Data

Dalam penelitian dibutuhkan sebuah instrumen tepat dan benar, atau disebut dengan validitas. Validitas adalah instrumen untuk mengukur kebenaran pada penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus sesuai dengan standard dan bisa dipakai sebagai panduan dalam akurasi data yang akan diteliti oleh peneliti. Bila skala pengukuran tidak sesuai tentu tidak akan bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang harus nya dilakukan. Data akan dianggap sesuai apabila data yang diperoleh dan diajukan sama dengan hasil yang telah diproses oleh peneliti.

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan bentuk ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan gaya yang dapat dilaporkan peneliti. Validasi data ini merupakan langkah peneliti untuk mencocokkan data yang berada di lapangan, sebelum akhirnya peneliti akan memberikan hasil atau uraian yang telah diteliti kepada para pembaca

. Dalam metode ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengecekan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dengan teknik triangulasi ini menjadikan peneliti untuk memperoleh informasi dengan lengkap (Mudrajad Kuncoro, 2013). Teknik triangulasi data dalam memastikan validasi data dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi teknik sumber, triangulasi teknik waktu, triangulasi teknik metode. Penjelasan dari setiap teknik triangulasi seperti dibawah :

1.2.5.1 Teknik Sumber

Dalam triangulasi sumber maka sumber berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dengan mudah peneliti dapat melakukan perbandingan hasil melalui pengamatan wawancara, membandingkan informasi pribadi dan umum, selain itu membandingkan hasil Tanya jawab dengan arsup yang ada.

1.2.5.2 Teknik Waktu

Teknik waktu dalam triangulasi memiliki kegunaan saat validitas data yang bersangkutan dengan pengamatan dapat tidak sesuai dalam mengamatai fenomena yang serupa. Pengamatan dan wawancara menggunakan dua atau lebih pengmat/wawancara akan dapat memperoleh data yang lebih absah. Dalam hal ini sebelum nya peneliti tentu akan melakukan kesepakatan dalam menentukan rincian terkait kriteria/acuan pengmatan dan atau wawancara.

1.2.5.3 Teknik Metode

Dalam teknik metode ini yang dilakukan oleh peneliti berupa mengecek kembali terkait sumber data, atau mengecek kembali terkait sumber temuan penelitian. Triangulasi metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama, dan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara cek dan recek.

Ketiga teknik dalam triangulasi yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti akan memilih salah satu teknik untuk digunakan dalam kegiatan

metode validasi data dari ketiga teknik peneliti akan menggunakan teknik Sumber. Teknik sumber ini secara garis besar peneliti akan melakukan pengecekan informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Kemudian data tersebut akan dilakukan pengecekan ulang atau ditanyakan ulang kepada subjek lain yang masih terkait satu sama lain. Dengan hal ini peneliti melakukan kegiatan ini untuk mengetahui apakah data dari subjek-subjek penelitian saling berkaitan satu dengan satu yang lain nya.

1.2.6 Metode Analisa Data

Pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam menyajikan data. Menurut Mathew B. Miles (Miles dan Huberman, 1992) analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kosakata dan bukan angka. Data itu telah didapatkan dalam macam bentuk yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

1.2.6.1 Reduksi Data

Data Reduction Data dalam penelitian kualitatif umumnya narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang muncul dari tulisan lapangan (Patilima, 2004). Reduksi data berlangsung terus menerus dalam pengumpulan data berlangsung. Pada intinya reduksi data terjadi sampai penulisan laporan akhir penelitian.

1.2.6.2 Penyajian Data

Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, informasi tersusun yang memberi penjelasan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpisah bagian demi bagian, bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa ditampilkan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, dapat memudahkan dalam mencerna apa yang terjadi, mengkonsep kerja berikutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

1.2.6.3 Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman Penarikan kesimpulan adalah verifikasi. Simpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara. Dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan menyokong tahap pengumpulan data selanjutnya. Apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel. Simpulan adalah intisari dari hasil penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa penjelasan atau penggambaran obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.3 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian kualitatif merupakan batasan terkait pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang akan diukur, diteliti, dan digali datanya oleh peneliti (Petra, 2010). Dengan adanya definisi konsep ini maka pembaca dapat mengetahui letak atau batasan terkait pengertian dari judul atau permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Maka dari itu terdapat beberapa batasan atau pengertian yang akan dijelaskan seperti dibawah berikut:

1.3.1 Strategi

Secara garis besar strategi merupakan rancangan atau rencana yang akan dilakukan sebelum melakukan sebuah kegiatan. Kata strategi sendiri memiliki sejarahnya, kata strategi muncul atau berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* merupakan "Seni dan Jenderal" (Siregar, 2020). Strategi ini tertuju ke suatu tujuan utama. Strategi merupakan penempatan, penetapan, dengan mengikat kalangan bahkan kekuatan secara internal dan juga eksternal. Strategi juga melakukan sebuah perumusan kebijakan dan strategi tertentu dalam mencapai sasaran dan memastikan

implementasinya secara tepat dan juga tujuan dari sasaran utama organisasi akan tercapai.

1.3.1 PUPR

PUPR sendiri merupakan singkatan dari (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Awal mula dari adanya PUPR ini berasal dari sejarahnya yaitu “Pekerjaan Umum” kata tersebut merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu “*Openbare Werken*” yang pada zaman Hindia Belanda disebut “*Waterstaat Swerken*”. Pada zaman jepang sendiri pekerjaan umum ini telah ada dikarenakan pada masa itu wilayah pemerintahan di jepang dibagi menjadi tiga yaitu Jawa/Madura, Sumatera, dan Indonesia Timur. Dalam masa jepang juga telah terbagi organisasi dalam bidang pembangunan yaitu Pekerjaan Oemoem (P.O), Oroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), Pekerjaan Umum (P.U) (pu.go.id).

1.3.3. Mitigasi

Mitigasi umumnya lebih dikaitkan dengan sebuah bencana alam yang terjadi. Pada sisi lain dalam adanya konflik juga dibutuhkan sebuah mitigasi. Mitigasi sendiri merupakan upaya dengan tujuan untuk meminimumkan dampak bencana dengan melakukan perencanaan yang tepat (Hengkelare et al., 2021). Walaupun mitigasi ini mengarah pada kebencanaan, akan tetapi mitigasi juga dibutuhkan dalam sebuah konflik.

1.3.4 Konflik

Dalam pembangunan bahkan kehidupan tidak akan jauh dari adanya konflik. Baik konflik langsung maupun konflik tidak langsung. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan antara dua atau lebih pihak, konflik organisasi merupakan ketidaksamaan baik dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena, adanya kenyataan mereka harus membagi sumber daya terbatas atau kegiatan kerja dan kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi (Gouldner, 1980).

1.3.5 Pembangunan

Pembangunan didefinisikan suatu bentuk kegiatan usaha tanpa akhir. Proses pembangunan sendiri sejatinya merupakan suatu perubahan kemasyarakatan dan perniagaan. Pembangunan ditujukan dapat melakukan suatu proses yang dapat bergerak maju. Selain itu pembangunan yang ada mempunyai kekuatannya sendiri, akan tetapi hal tersebut tergantung kepada manusia dan strukturnya. maka dari

itu pembangunan bukan hanya hal atau kegiatan yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

1.3.6 IKN

Ibu Kota Negara merupakan kawasan inti dari suatu negara tersebut. Penjelasan lain terkait Ibukota negara yaitu, Ibu Kota Negara merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat kekuasaan maupun pusat kebijakan (Fikri Hadi & Ristawati Rosa, 2020). Pada kasus lain, Ibu Kota Negara tidak selamanya berjalan sesuai penjelasan sebelumnya, seperti praktik pemerintahan yang ada di Amerika Serikat, dimana pusat atau Ibu Kotanya adalah Washington, akan tetapi Washington tidak menjadi pusat kegiatan atau bisnis di negara tersebut. Dengan hal ini setiap negara mempunyai praktik dalam menjalankan Ibukota negaranya sendiri.

